

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

International Whaling Commission (IWC) merupakan badan global yang fokus terhadap permasalahan paus. Badan ini berdiri sejak tahun 1949 setelah ditandatanganinya *International Convention for the Regulation of Whaling* (ICRW) pada tanggal 02 Desember 1946 di Washington DC, Amerika Serikat. Awal mula pendiriannya bertujuan untuk menyediakan pengembangan yang tepat bagi stok ikan paus sehingga memungkinkan bagi pengembangan industri penangkapan ikan paus secara teratur. Pada tahun 1982, terjadi perubahan tujuan menjadi pelarangan untuk melakukan perburuan paus hingga menimbulkan pertentangan dari *Scientific Committee*. Walaupun demikian, keputusan ini tetap diterapkan mulai tahun 1986 yang dikenal dengan sebutan moratorium.<sup>1</sup>

Hingga tahun 2018, IWC memiliki 89 cabang pemerintahan di berbagai penjuru dunia.<sup>2</sup> Pada tahun 1951, Jepang memutuskan untuk bergabung dengan IWC dengan alasan adanya persamaan tujuan. Tidak hanya itu, pada saat yang bersamaan, masyarakat Jepang juga sedang dilanda krisis kelaparan pasca PD II sehingga demi mengatasi hal tersebut diputuskan untuk bergabung dengan IWC.<sup>3</sup> Selama menjadi anggota IWC, Jepang berperan sebagai *Scientific Committee* yang bertugas untuk melakukan penelitian ilmiah dan publikasi hasil, statistik

---

<sup>1</sup>Mike Danaher, *Why Japan Will Not Give up Whaling*, *Pacifica Review: Peace, Security & Global Change: formerly Pacifica Review: Peace, Security & Global Change*, 14:2 (2002): hal. 105

<sup>2</sup>International Whaling Commission, *The International Whaling Commission (IWC)*, <https://iwc.int/home> diakses pada 15 Oktober 2019

<sup>3</sup>Fynn Holm. *After Withdraw from the IWC: The Future of Japanese Whaling*, *The Asia-Pacific Journal* Vol.17 (2019): hal. 2

serta laporan mengenai paus. Ini sesuai dengan Artikel IV dalam International Convention for the Regulation of Whaling (ICRW).<sup>4</sup>

Pasca diberlakukannya moratorium, Jepang harus menghentikan kegiatan berburu paus komersialnya tetapi perannya sebagai *Scientific Committee* menjadikan Jepang tetap bisa berburu paus namun tujuannya tidak lagi untuk komersial melainkan untuk penelitian ilmiah. Ini dikenal dengan istilah *Special Permit Whaling* dan tercantum dalam Artikel VIII dalam ICRW. *Special Permit Whaling* merupakan suatu izin khusus yang diberikan kepada negara untuk melakukan aktivitas seperti membunuh, mengambil serta merawat paus dengan tujuan untuk penelitian ilmiah.<sup>5</sup> Izin inilah yang kemudian disalahgunakan oleh Jepang sehingga menimbulkan banyak kecaman dari beberapa negara anggota IWC dan NGO yang kontra terhadap perburuan paus. Walaupun demikian, Jepang tetap melanjutkan kegiatan tersebut.<sup>6</sup>

Dalam menjalankan penelitiannya, terdapat beberapa program yang diajukan oleh Jepang seperti program *Japanese whale Research Program under Special Permit in the Antarctic* (JARPA). JARPA merupakan sebuah program penelitian yang dilaksanakan Jepang dengan tujuan utama untuk menjelaskan parameter biologis paus Minke di Antartika. Program ini pada dasarnya ialah program penelitian yang komprehensif untuk meneliti dan menggali informasi biologis dan ekologi yang berguna untuk pengelolaan stok ikan paus di Antartika. Program ini diluncurkan pada musim panas Australia tahun 1987/1988 serta

---

<sup>4</sup>Dan Goodman, *Evolution of the IWC Scientific Committee*, Institute of Cetacean Research, Tokyo, Japan (2017): hal. 71 - 75

<sup>5</sup>International Whaling Commission, *Special Permit Whaling (also known as Scientific Whaling)*, <https://iwc.int/permits>, diakses pada 17 Oktober 2019

<sup>6</sup>BBC News, *Japan whaling: Why commercial hunts have resumed despite outcry*, <https://www.bbc.com/news/world-asia-48592682> diakses pada 07 November 2019

dilaksanakan selama 18 tahun meliputi 2 tahun studi kelayakan tahun 1987/1988 dan 1988/1989.<sup>7</sup> Untuk realisasinya, Jepang mendirikan sebuah badan yang diberi nama Institute of Cetacean Research (ICR) pada Oktober 1987. Ini ialah badan yang spesialisasinya mengenai ilmu biologi dan sosial yang berkaitan dengan paus. Dalam kegiatannya, mereka berhasil menganalisis populasi bahkan ekosistem paus Minke di Antartika.<sup>8</sup>

Program kedua yakni *Second Phase of the Japanese Whale Research Program under Special Permit in the Antarctic (JARPA II)* yang dimulai pada tahun 2005. Ini ialah program lanjutan dari JARPA yang tujuannya untuk pemantauan ekosistem di Antartika, membuat model persaingan diantara spesies ikan paus, menjelaskan perubahan dari struktur stok, dan mengembangkan prosedur manajemen untuk stok paus Minke di Antartika.<sup>9</sup> Berbeda dengan program sebelumnya yang hanya menangkap paus Minke saja, kali ini jenis paus yang ditangkap ditambah menjadi paus Minke, Humpback dan Fin. Selain itu, kuota paus Minke juga ditambah 100 ekor pertahunnya.<sup>10</sup>

Selanjutnya ada *Research Plan for Cetacean Studies in the Western North Pacific under Special Permit (JARPN)* yang berlangsung dari tahun 1994 – 1999. Ini ialah suatu program yang wilayah penelitiannya di Pasifik Utara bagian barat dengan target penelitian 100 ekor paus Minke pertahun. Tujuan utamanya adalah

---

<sup>7</sup>Government of Japan, *Plan for the Second Phase of the Japanese Whale Research Program under Special Permit in the Antarctic (JARPA II) – Monitoring of the Antarctic Ecosystem and Development of New Management Objectives for Whales Resources*, hal.5

<sup>8</sup>BBC News

<sup>9</sup>Marc Mangel, *An Assessment of Japanese Whale Research Programs Under Special Permit in the Antarctic (JARPA, JARPA II) as Programs for Purposes of Scientific Research in the Context of Conservation and Management of Whales*, University of California (2011): hal. 361 - 362

<sup>10</sup>The Institute of Cetacean Research, *The Second Phase of Japan's Whale Research Program under Special Permit in the Antarctic (JARPA II)*, <https://www.icrwhale.org/QandA2.html> diakses pada 07 November 2019

untuk mengklasifikasikan identitas stok paus di Pasifik Utara serta sebagai uji kelayakan untuk pengembangan program ekologi pemberian makan terhadap paus.<sup>11</sup>

Selain itu juga ada JARPN II yang dilaksanakan mulai dari tahun 2000 – 2016. Pada program ini jumlah paus yang diminta sebanyak 100 ekor paus Minke, 50 ekor paus Bryde dan 10 ekor paus Sperma. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan atas sumber daya hayati termasuk paus di Pasifik Utara bagian barat.<sup>12</sup> Kemudian ada *New Scientific Research Programme in the Antarctic Ocean* (NEWREP-A). Ini merupakan proposal formal untuk program izin khusus baru yang diajukan oleh Jepang kepada IWC agar bisa menangkap paus di Antartika yang dijadwalkan dilakukan pada tahun 2015/2016 sesuai musim di Antartika.<sup>13</sup>

Berkaitan dengan perburuan paus yang dilakukan oleh Jepang, pascadiberlakukan moratorium, pemerintah nasional Jepang mengarahkan masyarakatnya untuk mengubah target perburuan dari paus Minke menjadi paus hidung botol ukuran kecil dan paus Pilot yang berada diluar yurisdiksi IWC dan tidak tercantum di dalam moratorium.<sup>14</sup> Namun, setelah 32 tahun menjadi anggota IWC, pada tanggal 26 Desember 2018, Jepang mengumumkan pengunduran dirinya dari IWC. Keputusan ini merupakan hasil pertemuan yang dilaksanakan para anggota kabinet dan disampaikan langsung oleh Kepala Sekretaris Kabinet,

---

<sup>11</sup>International Whaling Commission, *Special Permit Programmes*, <https://iwc.int/spw-programmes> diakses pada 17 Januari 2020

<sup>12</sup>International Whaling Commission

<sup>13</sup>International Whaling Commission

<sup>14</sup>Fynn Holm, hal. 3

Yoshihide Suga.<sup>15</sup> Beliau menyampaikan bahwasannya Jepang akan memulai kembali perburuan paus komersial yang telah dihentikan sejak moratorium tahun 1986 dan dilaksanakan kembali mulai Juli 2019.<sup>16</sup> Hal ini menjadi menarik untuk diteliti karena sejak bergabung dengan IWC, Jepang telah memiliki beberapa kontribusi yang besar terhadap visi maupun misi dengan menjadi negara pendonor terbesar dan juga aktif dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Selain itu, sejak terjadinya Perang Dunia II Jepang jarang keluar dari suatu rezim internasional. Namun pada tahun 2019, Jepang memutuskan untuk keluar dari IWC. Inilah yang kemudian menjadi landasan bagi peneliti untuk meneliti motif keluarnya Jepang dari IWC tahun 2019.

## 1.2 Rumusan Masalah

Pada mula pendirian IWC dimaksudkan untuk pengembangan industri paus. Hal ini kemudian menjadi alasan bagi Jepang untuk bergabung pada tahun 1951 disamping permasalahan kelaparan yang dialami masyarakatnya pasca PD II. Selama menjadi anggota IWC, Jepang berperan sebagai *Scientific Committee* dengan salah satu keberhasilannya yakni dapat menganalisis populasi serta ekosistem paus Minke di Antartika. Pasca moratorium tahun 1986, Jepang menghentikan perburuan paus komersial mereka dan mengganti target perburuan menjadi paus hidung botol ukuran kecil dan paus Pilot yang berada diluar yurisdiksi IWC dan tidak tercantum di dalam moratorium. Tetapi pada akhir tahun 2018, Jepang mengumumkan pengunduran dirinya dan memulai kembali perburuan paus komersial pada Juli 2019. Hal ini yang kemudian menjadi

---

<sup>15</sup>Fynn Holm, hal. 1

<sup>16</sup>Prime Minister of Japan and His Cabinet, *Cabinet Decisions and Other Announcements*, [https://japan.kantei.go.jp/98\\_abe/decisions/2018/\\_00008.html](https://japan.kantei.go.jp/98_abe/decisions/2018/_00008.html), diakses pada 26 November 2019

landasan bagi peneliti untuk meneliti motif keluarnya Jepang dari IWC tahun 2019 mengingat sejak memutuskan untuk bergabung, Jepang telah memiliki beberapa kontribusi yang besar terhadap visi maupun misi IWC dengan menjadi negara pendonor terbesar dan juga aktif dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Selain itu, sejak terjadinya Perang Dunia II Jepang jarang keluar dari rezim internasional.

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Mengacu kepada latar belakang dan rumusan masalah yang telah peneliti paparkan sebelumnya, maka pertanyaan penelitian yang akan dijawab adalah mengapa Jepang memutuskan keluar dari International Whaling Commission (IWC) pada tahun 2019?

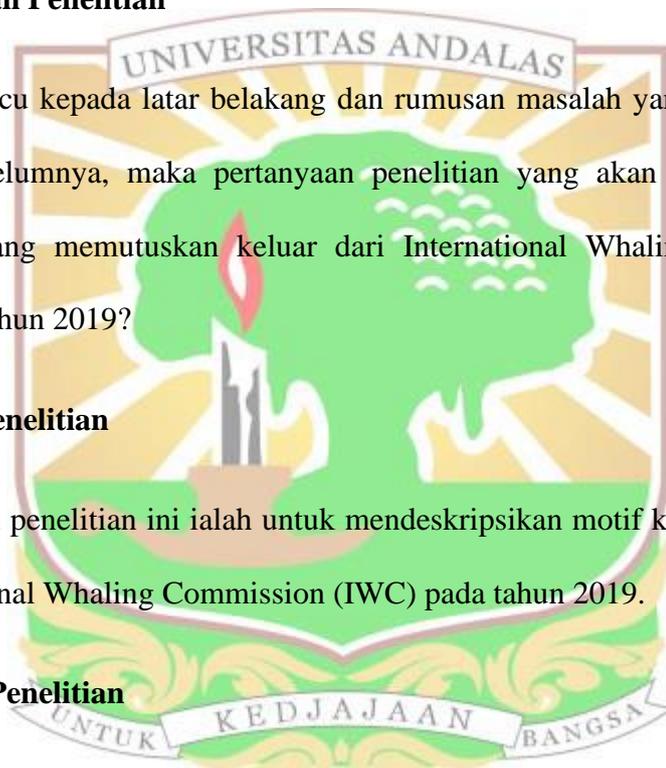
### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan motif keluarnya Jepang dari International Whaling Commission (IWC) pada tahun 2019.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk menambahkan wawasan dan pengetahuan serta mengasah kemampuan dalam memecahkan masalah khususnya bagi para penstudi Ilmu Hubungan Internasional.
2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan informasi serta pengetahuan mengenai motif Jepang memutuskan keluar dari International Whaling Commission (IWC) pada tahun 2019.



## 1.6 Studi Pustaka

Untuk menganalisis judul yang diangkat, peneliti memaparkan acuan pada beberapa tinjauan pustaka yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Penelitian sebelumnya menjadi tolak ukur dan landasan penulis dalam mengembangkan ruang lingkup penelitian, yaitu penelitian yang menganalisis motif keluarnya Jepang dari International Whaling Commission (IWC) pada tahun 2019.

Tinjauan pustaka pertama ialah tulisan Lisa Kobayashi yang berjudul “*Lifting the International Whaling Commission’s Moratorium on Commercial Whaling as the Most Effective Global Regulation of Whaling*”.<sup>17</sup> Di dalam tulisan tersebut dipaparkan mengenai asal mula adanya perburuan paus sebelum dibentuknya regulasi mengenai aktifitas tersebut. Diceritakan bahwasannya kegiatan ini telah ada sejak ribuan tahun yang lalu dan dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan seperti untuk makanan, minyak, pakaian, peralatan, material pembangunan serta berbagai kebutuhan lainnya. Kemudian juga dipaparkan bagaimana aktifitas penangkapan ikan paus sebelum adanya regulasi yang jelas dan disebutkan bahwa ada kesepakatan antara sektor *private* dengan perusahaan penangkapan ikan paus. Tidak hanya itu, dalam tulisan ini juga dijelaskan bahwa terdapat perdebatan antara negara yang mendukung penangkapan paus dengan negara yang kontra. Negara yang mendukung penangkapan ikan paus berupaya untuk menghapus moratorium dengan alasan bahwa IWC telah berhasil melaksanakan tujuan mereka untuk memulihkan kembali populasi paus.

---

<sup>17</sup>Lisa Kobayashi, *Lifting the International Whaling Commission’s on Commercial Whaling as the Most Effective Global Regulation of Whaling*, *Environs* 29 (2006), hal. 177 - 219

Tulisan kedua yang menjadi acuan bagi peneliti ialah tulisan yang ditulis oleh Keiko Hirata yang berjudul “*Why Japan Supports Whaling*”.<sup>18</sup> Dalam tulisan ini disebutkan bahwasannya Jepang sangat aktif melakukan lobi terhadap IWC untuk memudahkannya melakukan aktifitas berburu paus. Hal ini tentunya mendapat kecaman dari dunia internasional. Padahal Jepang sangat mendukung dan menjadi aktor penting dalam rezim lingkungan. Hal ini terlihat dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Jepang terkait isu pemanasan global. Namun mengapa dalam hal penangkapan paus Jepang tidak mendukung. Bagi Jepang, industri penangkapan ikan paus merupakan industri yang sangat menguntungkan. Hal ini karena setiap bagian dari paus dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan bagi masyarakat Jepang. Kemudian juga, ini telah menjadi budaya bagi Jepang dan telah berlangsung sejak dahulu. Selanjutnya, dalam tulisan ini juga dijelaskan mengenai kebijakan Jepang yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti budaya dan telah menjadi identitas bagi negara Jepang sendiri.

Tulisan ketiga ialah yang ditulis oleh Jun'ichi Takahashi, et al, yang berjudul “*Japanese Whaling Culture: Continuities and Diversities*”.<sup>19</sup> Dalam tulisan ini dijelaskan mengenai sejarah perburuan paus di Jepang mulai dari era sebelum mengenal teknologi (pra modern) sampai kepada era modern. Kemudian, diceritakan juga mengenai berbagai jenis yang digunakan oleh Jepang dalam melakukan kegiatan ini antara lain *large type coastal*, *pelagic* serta *small coastal*. Masing-masing jenis penangkapan memiliki target yang berbeda-beda mulai dari perbedaan jenis ikan yang akan ditangkap serta berapa jumlah kuota yang menjadi

---

<sup>18</sup>Keiko Hirata, *Why Japan Supports Whaling*, *Journal of International Wildlife and Policy* 8 (2005): hal 1-32

<sup>19</sup>Jun'ichi Takahashi, hal. 105-133.

target perburuan. Adapun kegiatan ini dikelola oleh organisasi sosial dan seiring berjalannya waktu berubah menjadi industri perburuan paus. Dikarenakan proses produksi bersifat berkesinambungan sehingga kegiatan ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat disana. Selain itu, pemerintah Jepang juga mendukung kegiatan ini sebagai bagian dari tradisi masyarakat. Hal ini dilihat dari bagaimana pemerintah Jepang memang benar-benar membentuk regulasi mengenai penangkapan paus sebagai bagian dari kehidupan masyarakat.

Tulisan keempat yang menjadi acuan bagi peneliti ialah tulisan dari Dan Goodman dengan judul “*Japanese Whaling and International Politics*”.<sup>20</sup> Dalam tulisan ini dijelaskan bahwasannya terdapat isu-isu politik yang berkaitan dengan penangkapan ikan paus oleh negara Jepang. Kemudian juga digambarkan bagaimana posisi negara-negara yang tidak mendukung adanya kegiatan penangkapan paus dengan negara yang mendukung di IWC. Selanjutnya juga dikatakan bahwa IWC dinilai gagal dalam menjalankan tugas mereka. tulisan ini membantu peneliti untuk melihat bagaimana dinamika yang ada di dalam rezim IWC itu sendiri.

Tulisan terakhir yang peneliti jadikan referensi maupun pembanding ialah tulisan dari Rimby Soesilo dengan judul “Kepatuhan Jepang terhadap rezim International Whaling Commission (IWC) dalam Aktifitas Penangkapan Ikan Paus”.<sup>21</sup> Dalam tulisan tersebut dijelaskan bahwasannya pada tahun 1982, dilakukan pelarangan untuk melakukan aktifitas penangkapan ikan paus dan ini mulai diaplikasikan sejak tahun 1986. Dalam prakteknya, Jepang tetap melakukan

---

<sup>20</sup>Dan Goodman, hal.325-335

<sup>21</sup>Rimby Susilo, *Kepatuhan Jepang Terhadap Rezim International Whaling Commission (IWC) dalam Aktifitas Penangkapan Ikan Paus*, 2019. (Skripsi Universitas Andalas)

aktifitas penangkapan ikan paus namun atas dasar penelitian ilmiah. Hal ini dapat dilakukan oleh Jepang melalui mekanisme *Special Permit Whaling* yang diberikan oleh IWC. proposal pengajuan tersebut mulai dari program JARPA (*Japanese whale Research Program under Special Permit In the Antarctic*) serta JARPA II. Kegiatan ini membuat Jepang dianggap tidak patuh dengan rezim tersebut karena berusaha untuk mempermudah mereka melakukan kegiatan penangkapan paus sehingga menimbulkan banyak kecaman dari masyarakat internasional. Berangkat dari lima tinjauan pustaka diatas, terlihat bahwasannya penelitian mengenai motif keluarnya Jepang dari IWC pada tahun 2019 belum pernah dilakukan.

### **1.7 Kerangka Konseptual**

Sebagai pedoman dalam melakukan sebuah penelitian, konsep memiliki peranan yang sangat penting. Hal ini supaya penelitian yang dilakukan tidak keluar dan melenceng dari permasalahan yang hendak diselesaikan sehingga mampu menjawab pertanyaan penelitian yang telah dituliskan sebelumnya dan tujuan penelitian dapat tercapai. Ada 3 kategori yang dapat digunakan untuk menganalisis alasan negara keluar dari suatu IGO antara lain: politik domestik, karakteristik IGO dan geopolitik.<sup>22</sup>

#### **1. Politik Domestik**

Salah satu hal yang dapat mendorong suatu negara memutuskan untuk keluar dari IGO ialah peran politik domestik. Menurut indikator ini, seorang pemimpin negara dapat memanfaatkan negosiasi internasional untuk membantu mereka mendapatkan apa yang diinginkan. Dengan kata lain, keanggotaan IGO

---

<sup>22</sup>Inken von Borzyskowski dan Felicity Vabulas, *Hello, goodbye: When do states withdraw from international organizations?* Springer Science+Business Media, LLC, part of Springer Nature (2019), hal. 346

memiliki konsekuensi elektoral. Oleh sebab itu, pemimpin negara dapat membuat keputusan dalam negosiasi yang dilaksanakan oleh para anggota IGO untuk meningkatkan kerjasama internasional serta memuaskan konstituen/bagian penting domestiknya.<sup>23</sup>

Indikator ini juga mengatakan bahwa negara yang memiliki tingkat konsolidasi demokrasi tinggi akan rendah kemungkinannya untuk mengundurkan diri dari IGO. Hal ini dikarenakan biaya yang dikeluarkan untuk melanggar suatu komitmen internasional cenderung bernilai besar. Disisi lain, demokrasi yang sangat terkonsolidasi tidak memerlukan logika pensinyalan dari IGO seperti kebanyakan negara yang membutuhkan mekanisme dari luar untuk reformasi kebijakannya.<sup>24</sup>

Kemudian juga, literatur politik domestik dalam keanggotaan IGO menunjukkan bahwasannya partai politik mendukung kebijakan luar negeri suatu negara untuk bergabung kedalam sebuah IGO. Artinya, keputusan negara untuk bergabung ke dalam suatu IGO dipengaruhi oleh kebijakan politik luar negeri mereka dan partai politik berperan dalam pembentukan kebijakan tersebut. Apabila terjadi perubahan dalam pemerintahannya, maka hal ini juga akan mempengaruhi negara untuk keluar dari keanggotaan dalam suatu IGO. Suatu negara bisa memutuskan untuk keluar dari sebuah IGO setelah adanya pemilihan pemerintahan disebabkan ideologi dari partai politik yang berkuasa juga mempengaruhi keputusan kebijakan luar negeri karena partai merupakan refleksi dari opini publik. Untuk menghindari dampak negatif dari keterhubungan dengan

---

<sup>23</sup>Inken von Borzyskowski dan Felicity Vabulas, hal. 347

<sup>24</sup>Inken von Borzyskowski dan Felicity Vabulas, hal. 347

yang lain, maka partai nasionalis di suatu negara sering mengkampanyekan untuk melawan institusi internasional. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa suatu negara akan cenderung memilih untuk keluar dari suatu IGO apabila negara tersebut memiliki perwakilan nasionalis serta terjadi perubahan dalam pemerintahannya.<sup>25</sup>

## 2. Karakteristik IGO

Indikator selanjutnya yang dapat digunakan untuk menganalisis motif keluar negara dari IGO ialah konsep karakteristik IGO. Menurut indikator ini, alasan suatu negara memilih untuk keluar dari suatu IGO bisa juga dikarenakan karakteristik dan fungsi dari IGO itu sendiri. Literatur aksesi fungsionalis IGO mengatakan bahwasannya ada alasan-alasan tertentu yang dimiliki oleh negara sehingga memutuskan untuk bergabung ke dalam suatu IGO. Apabila IGO tersebut dinilai mampu untuk memenuhi hal yang diinginkan oleh negara, maka negara tersebut akan bertahan namun apabila IGO tersebut sudah tidak mampu atau tidak berfungsi lagi seperti yang negara inginkan, maka hal ini dapat membuat negara memilih untuk keluar dari keanggotaan tersebut. Negara akan keluar dari keanggotaan apabila performa dari IGO tersebut buruk.<sup>26</sup>

Literatur aksesi IGO menekankan bahwa suatu IGO dapat memiliki karakteristik yang bermanfaat sehingga berguna bagi negara anggota apabila negara anggota dan IGO sama-sama dilibatkan dalam IGO tersebut. Indikator ini mengatakan bahwasannya negara akan lebih mungkin untuk bekerjasama apabila negara memiliki preferensi bersama. Perbedaan preferensi menjadi salah satu

---

<sup>25</sup>Inken von Borzyskowski dan Felicity Vabulas, hal. 347 - 348

<sup>26</sup>Inken von Borzyskowski dan Felicity Vabulas, hal. 348

alasan negara cenderung untuk keluar.<sup>27</sup> Selain itu, heterogenitas desain IGO juga memiliki pengaruh dalam keputusan negara untuk keluar dari IGO. Negara akan cenderung bertahan apabila IGO sangat terstruktur dan menjadi institusi terbaik untuk mencapai dukungan administratif dan independensi terpusat yang diusahakan oleh negara. Jadi, karakteristik IGO lebih menekankan kepada manfaat fungsional dari menjadi anggota dan pentingnya desain institusional. Dari segi fungsionalnya, negara akan memutuskan untuk keluar dari IGO apabila IGO tersebut dinilai tidak efektif ataupun kurang demokratis. Dari segi desain, negara akan menarik diri apabila IGO tersebut kurang terinstitusi.<sup>28</sup>

### 3. Geopolitik

Indikator terakhir yang dapat digunakan untuk menganalisis keluarnya negara dari suatu IGO ialah konsep Geopolitik. Indikator ini merupakan bagian penting untuk memahami keanggotaan IGO. Secara keseluruhan, faktor geopolitik menekankan bahwa preferensi suatu negara dalam hubungan dengan negara anggota dapat memberikan dampak di dalam keanggotaan IGO. Banyak peneliti yang beranggapan bahwasannya IGO membantu menyaring negara-negara dengan preferensi yang sama. Artinya, negara yang tergabung ke dalam suatu IGO telah memiliki preferensi yang sama. Kemudian juga, IGO juga bisa membantu untuk mendesak negara. Maksudnya, apabila ada negara yang memiliki preferensi yang berbeda dengan negara anggota yang lain dan tidak memiliki kepentingan

---

<sup>27</sup>Inken von Borzyskowski dan Felicity Vabulas, hal. 348

<sup>28</sup>Inken von Borzyskowski dan Felicity Vabulas, hal. 348 - 349

bersama lagi, IGO dapat mendesak negara tersebut untuk mengubah preferensi tersebut. Untuk menghindari hal tersebut, maka negara memilih untuk keluar.<sup>29</sup>

*Power* juga memiliki peran sentral dalam menjelaskan mengenai geopolitik keanggotaan IGO karena negara yang *powerful* dapat mengkonstruksi IGO untuk mengunci negara lemah agar pengaturan menjadi lebih stabil dan dapat diprediksi sehingga mengurangi potensial biaya yang lebih besar dikemudian hari. Namun juga, negara yang kuat juga ada kemungkinan untuk keluar. Hal ini untuk membuktikan bahwasannya mereka mampu untuk berdiri sendiri. Kemudian, negara yang lemah akan memilih untuk mengundurkan diri apabila kerjasama tersebut tidak menguntungkan mereka.<sup>30</sup>

Perubahan kekuatan negara khususnya kebangkitan negara-negara baru yang kuat juga penting dalam keanggotaan IGO. Gilpin (1983) mengatakan bahwa ketika suatu negara kuat mulai menurun, *rising power* akan menantang tatanan internasional yang ada dan mereka dapat memperhitungkan apakah IGO tersebut menguntungkan bagi mereka atau tidak. Apabila tidak, maka mereka akan memilih untuk keluar dari IGO yang bersangkutan.<sup>31</sup>

Terakhir, teori tindakan kolektif menunjukkan pentingnya aktor istimewa seperti hegemon dalam menyediakan *public good*, namun apabila pemimpin-pemimpin ini pergi, maka anggota lain hanya akan mendapatkan sedikit manfaat sehingga mereka memutuskan untuk mengundurkan diri. Disintegrasi yang terjadi juga dapat mempengaruhi anggota lain untuk melakukan hal yang sama. Jadi, anggota IGO yang memungkinkan untuk keluar ialah negara yang sedang *rising*,

---

<sup>29</sup>Inken von Borzyskowski dan Felicity Vabulas, hal. 349

<sup>30</sup>Inken von Borzyskowski dan Felicity Vabulas, hal. 349

<sup>31</sup>Inken von Borzyskowski dan Felicity Vabulas, hal. 349 - 350

memiliki preferensi yang berbeda serta negara yang terpengaruh negara lain untuk ikut keluar.<sup>32</sup>

Berdasarkan kepada penjelasan diatas, faktor seperti politik domestik, karakteristik IGO serta geopolitik dapat menjawab pertanyaan penelitian yaitu mengapa Jepang memutuskan untuk keluar dari International Whaling Commission pada tahun 2019. Hal ini dikarenakan keputusan Jepang untuk keluar dari kesepakatan diatas dapat disebabkan oleh ketiga faktor diatas. Seperti pada tahun 2014, terjadi perubahan susunan kabinet dalam pemerintahan Jepang. Hal ini bisa saja menjadi salah satu faktor mengapa Jepang memutuskan keluar dari IWC. Selain itu karakteristik IWC yang dinilai tidak lagi mampu memenuhi keinginan Jepang juga bisa menjadi salah satu alasannya. Kemudian faktor geopolitik dimana Jepang memiliki preferensi yang berbeda dari kebanyakan anggota IWC mendorongnya untuk keluar dari organisasi tersebut.

## **1.8 Metodologi Penelitian**

### **1.8.1 Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Adapun jenis penelitian yang peneliti gunakan ialah deskriptif analitis dimana fenomena yang dideskripsikan akan peneliti jabarkan menjadi lebih rinci dan

---

<sup>32</sup>Inken von Borzyskowski dan Felicity Vabulas, hal. 350

selanjutnya akan peneliti **analisis**.<sup>33</sup> Setelah peneliti mendeskripsikan penelitian maka ditemukan motif keluarnya Jepang dari IWC pada tahun 2019.

### **1.8.2 Batasan Penelitian**

Agar lebih memahami sasaran dalam penelitian ini, maka penulis perlu untuk memberikan batasan. Adapun batasan penelitian ini mengacu kepada dua hal yakni batasan waktu disaat fenomena tersebut terjadi serta batasan permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan motif Jepang keluar dari IWC pada tahun 2019. Sedangkan batas tahun yang penulis ambil mulai dari tahun 2014 dikarenakan pada tahun ini banyak terjadi perubahan di dalam pemerintahan Jepang seperti berakhirnya program-program penelitian ilmiah yang telah dilaksanakan oleh Jepang sejak tahun 1987, ditetapkannya serangkaian penelitian yang dilakukan oleh Jepang memang untuk tujuan komersial oleh International Court of Justice (ICJ) serta terjadinya perubahan susunan kabinet dalam pemerintahan Jepang sampai kepada tahun 2019 ketika Jepang mengumumkan pengunduran dirinya dari IWC.

### **1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis**

Unit analisis ialah objek kajian yang perilakunya akan dijelaskan. Sedangkan unit eksplanasi ialah unit yang dapat mempengaruhi unit analisis. Kemudian level atau tingkat analisis ialah posisi atau kedudukan dari unit yang

---

<sup>33</sup>Iskandar. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kualitatif dan Kuantitatif)*. Jakarta: Gaung Persamda Press, (2008): hal. 186

dijelaskan. Selanjutnya, level analisis ini akan membantu peneliti menjelaskan ruang lingkup area yang dijelaskan.<sup>34</sup>

Pada penelitian kali ini, yang menjadi unit analisis berupa motif keluarnya Jepang dari IWC pada tahun 2019. Sedangkan unit eksplanasi berupa pengaruh faktor-faktor seperti politik domestik, karakteristik IGO serta geopolitik yang terjadi selama menjadi anggota IWC. Selanjutnya, level analisis berada pada tingkat negara.

#### 1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kali ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan studi pustaka yang mana dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan merupakan data sekunder atau berdasarkan kepada referensi maupun penelitian ilmiah yang telah ada dan dilakukan sebelumnya.<sup>35</sup> Teknik pengumpulan data yang dilakukan bisa didapatkan dari pengumpulan dokumen serta tulisan-tulisan ilmiah baik itu dalam bentuk jurnal, buku, dokumen, situs terpercaya serta sumber lainnya yang relevan terhadap penelitian.

Pada penelitian ini, data-data yang dikumpulkan berkaitan dengan *Japan withdraws from International Whaling Commission* yang diakses langsung dari situs resmi IWC dan pernyataan dari pemerintah Jepang. Selain itu, juga diperoleh data dari media surat kabar seperti *NHK World*, *BBC News*, dan juga situs jurnal terpercaya seperti *Science Direct*. Agar dapat menemukan data yang diinginkan, peneliti menggunakan *keyword* seperti “*Japan withdraw from IWC*” atau “*Japan*

---

<sup>34</sup>Mochtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, Yogyakarta: Pusat Antar Universitas-Studi Sosial Universitas Gadjah Mada, (1990): hal. 35-286

<sup>35</sup>Harnovinsah, *Metodologi Penelitian: Modul 3* (Universitas Mercu Buana), 1.

*resume commercial whaling*” untuk mendapatkan informasi atau data mengenai keluarnya Jepang dari IWC. kemudian *keyword “whaling in Japan”* untuk mendapatkan data mengenai bagaimana dinamika perburuan paus dan arti pentingnya bagi masyarakat Jepang. Selanjutnya *keyword “International Whaling Commission”* untuk mendapatkan data mengenai bagaimana dinamika di dalam keanggotaan IWC, apa tujuan didirikan, bagaimana pengambilan keputusannya dan sebagainya yang berkaitan dengan organisasi ini. Hal ini dikarenakan apabila suatu negara memutuskan untuk keluar dari suatu organisasi, bisa disebabkan oleh banyak hal termasuk karakteristik dari organisasi tersebut.

### 1.8.5 Teknik Analisis Data

Pada penelitian kali ini dilihat motif Jepang sehingga memutuskan untuk keluar dari International Whaling Commission (IWC) pada tahun 2019. Upaya tersebut penulis analisis dengan menggunakan tiga indikator yakni: politik domestik, karakteristik IGO serta geopolitik. Analisis ini sendiri berbentuk deskriptif kualitatif dimana peneliti dapat menginterpretasikan data yang ada dengan menggambarkan setiap variabel penelitian dengan analisa yang terperinci dan konkret.<sup>36</sup> Kemudian dalam teknik analisis data, peneliti menggunakan metode kualitatif. Dalam metode tersebut, terdapat tiga tahapan antara lain :<sup>37</sup>

#### 1. Mereduksi Data

Pada tahapan ini, dilakukan pereduksian ataupun pengurangan terhadap data yang diperoleh yang menurut peneliti dinilai tidak sesuai dengan penelitian

---

<sup>36</sup>Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif, ( Jakarta, 2012), Hal. 83

<sup>37</sup>Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, ”Qualitative Data Analysis”, Sage Publication, 1994, Hal. 18

ini. Oleh sebab itu, peneliti hanya menggunakan data-data yang ada kaitannya dengan penelitian penulis seperti isu perburuan paus yang dilakukan oleh Jepang serta motif Jepang memutuskan untuk keluar dari International Whaling Commission (IWC) pada tahun 2019 sehingga data-data lain yang tidak ada kaitan dengan hal tersebut akan peneliti reduksi.

## 2. Penyajian Data

Tahap ini terdiri dari proses penghubungan antara data dengan kerangka konseptual. Pada tahapan ini dihubungkan antara konsep atau teori yang dipakai dengan motif keluarnya Jepang dari International Whaling Commission (IWC) pada tahun 2019.

## 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Dalam proses analisis data, peneliti mengumpulkan data-data yang terkait dengan motif keluar Jepang dari International Whaling Commission (IWC) pada tahun 2019. Pada tulisan ini dilakukan perbandingan atas data yang diperoleh dengan kerangka konseptual yang digunakan. Setelah itu, dilakukan evaluasi apakah dengan menggunakan tiga kondisi ini apakah mampu menjawab pertanyaan mengenai motif keluarnya Jepang dari IWC pada tahun 2019.

## 1.9 Sistematika Penulisan

### BAB I Pendahuluan

BAB ini membahas mengenai latar belakang dari penelitian, melihat rumusan masalah, mengkonsep pertanyaan penelitian, menentukan tujuan penelitian, manfaat penelitian, menjelaskan studi pustaka, menjabarkan kerangka

konseptual yang digunakan, metodologi dalam penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

## **BAB II Perburuan Paus di Jepang**

Pada bab ini dijelaskan mengenai bagaimana awal mula terbentuknya tradisi berburu paus di Jepang, bagaimana perkembangan tradisi tersebut hingga menjadikan Jepang sebagai negara industri perburuan paus, bagaimana dinamika kehidupan masyarakat di Jepang dan arti berburu paus bagi masyarakat setempat serta hal-hal yang berkaitan dengan perburuan paus di negara tersebut.

## **BAB III Kepatuhan Jepang terhadap International Whaling Commission (IWC)**

BAB ini mendeskripsikan bagaimana IWC sebagai sebuah organisasi internasional dan kemudian menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme seperti bagaimana kegiatan operasionalnya, serta bagaimana keanggotaan yang terdapat di dalam IWC. Selanjutnya juga akan dijelaskan mengenai bagaimana kepatuhan Jepang terhadap IWC selama tergabung kedalam keanggotaan tersebut. Bagaimana cara Jepang melakukan perburuan paus setelah adanya moratorium dan berbagai hal yang berkaitan dengan kepatuhan Jepang di IWC lainnya.

## **BAB IV Analisis motif keluarnya Jepang dari International Whaling Commission tahun 2019**

BAB ini mendeskripsikan mengenai motif Jepang keluar dari International Whaling Commission (IWC) pada tahun 2019. Pembahasan ini nantinya disertai

dengan analisis menggunakan kerangka konseptual yang telah dipilih. Pada bab ini juga dijelaskan faktor-faktor seperti politik domestik, karakteristik IGO serta geopolitik sebagai faktor yang mendorong negara untuk keluar dari sebuah kerjasama.

## **BAB V Penutup**

BAB ini disimpulkan berbagai temuan dari analisis yang telah dilaksanakan selama penelitian demi menjawab pertanyaan permasalahan yang telah diberikan sebelumnya. Kemudian juga disajikan hasil dan kesimpulan didapat setelah melakukan penelitian.

